

## Sinergi Antartingkatan Pemerintahan dalam Penghapusan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti

Fajar Budiman

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau  
azzamazzahra@gmail.com

Received: 25/08/2025; Revised: 11/11/2025; Accepted: 12/11/2025; Published: 05/12/2025

### ABSTRACT

*Kepulauan Meranti Regency occupies a strategic position in the IMS-GT growth triangle; however, it records the highest poverty rate in Riau Province (23.15% in 2024) and ranks 45th nationally. This study aims to analyze the alignment of local poverty alleviation policies with provincial and national policies. The approach utilizes comparative policy analysis of the RPJMN 2025–2029, Riau Province RPJMD 2025–2029, and Kepulauan Meranti Regency RPJMD 2025–2029 documents, as well as USG (Urgency, Seriousness, Growth) analysis to identify root causes. The findings reveal that the low quality of human development is the primary root cause of poverty. The study found that the synergy of poverty eradication programs within the Draft RPJMD of Kepulauan Meranti Regency is not optimally aligned with higher-level government policy directions. Additionally, fiscal allocation inefficiency was identified, where 32.23% of the budget is absorbed by poverty-related programs without effectively reducing poverty rates. This study concludes by recommending the establishment of a formal "Funding Synergy Plan" mechanism, consistent with the HKPD Law, to integrate cross-governmental resources, address local fiscal burdens, and enhance the effectiveness of program interventions.*

*Keywords: Poverty Eradication Program Synergy, Fiscal Constraints, Funding Synergy Plan*

### ABSTRAK

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki posisi strategis dalam segitiga pertumbuhan IMS-GT, namun mencatat tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau (23,15% pada 2024) dan menempati peringkat ke-45 secara nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis keselarasan kebijakan pengentasan kemiskinan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional. Metode yang digunakan adalah *comparative policy analysis* terhadap dokumen RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Riau 2025–2029, dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2025–2029, serta analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk identifikasi akar masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar masalah utama adalah rendahnya kualitas pembangunan manusia. Ditemukan bahwa sinergi program penghapusan kemiskinan dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti belum optimal selaras dengan arah kebijakan pemerintah atasan. Selain itu, teridentifikasi inefisiensi alokasi fiskal di mana 32,23% anggaran terserap untuk kemiskinan namun belum efektif menurunkan angka secara signifikan. Kesimpulan studi ini merekomendasikan perlunya mekanisme formal "Rencana Sinergi Pendanaan" sesuai UU HKPD untuk mengintegrasikan sumber daya lintas tingkatan pemerintahan guna mengatasi beban fiskal daerah dan meningkatkan efektivitas intervensi program.

Kata Kunci : Sinergi Program Penghapusan Kemiskinan, Keterbatasan fiskal, Rencana Sinergi Pendanaan

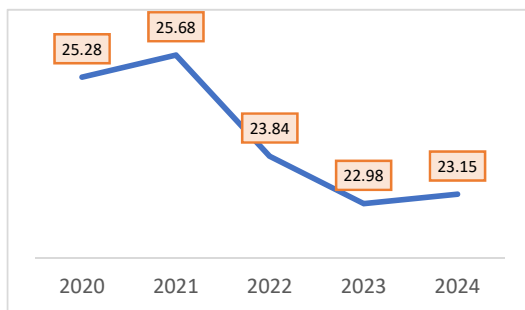
### PENDAHULUAN

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki 4 pulau utama dan 8 pulau kecil serta 18 sungai. total luas wilayah kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebesar 3.623,95 km, dengan

luas pulau-pulau utamanya seperti pulau Tebing Tinggi (1.379,31 km<sup>2</sup>), pulau Rangsang (918,46 km<sup>2</sup>), dan pulau Padang dan Merbau (1.326,18 km<sup>2</sup>). Posisi astronomis Kabupaten Kepulauan Meranti terletak pada posisi antara 0° 42' 30" - 01°28' 0"

lintang utara (lu) dan 102° 12' 0" – 103° 10' 0" bujur timur (bt) dengan posisi terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah segitiga pertumbuhan ekonomi (*growth triangle*) Indonesia, Malaysia, Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah *hinterland* kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) Batam - Tanjung Balai Karimun (Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, 2025)

Posisi strategis Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut tidak berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Diketahui bahwa tingkat kemiskinan di kabupaten ini juga tergolong tinggi. Menurut data BPS Provinsi Riau tahun 2025, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau yaitu sebesar 23,15% pada tahun 2024. Perkembangan tingkat kemiskinan dapat dilihat pada gambar 1 (BPS Provinsi Riau, 2025)



Gambar 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti memang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan sebesar 25,28%

dan turun menjadi 23,15% pada tahun 2024. Selama periode 2020-2024, tingkat kemiskinan rata-rata menurun sebesar -2,11% per tahun. Namun demikian tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan Provinsi Riau yang hanya sebesar 6,67%.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk 45 Kabupaten/Kota tertinggi di Indonesia, yang rata-rata merupakan Kabupaten/Kota pada bagian timur Indonesia. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan yang tertinggi. Bahkan Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota pada pulau-pulau besar di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti masih yang tertinggi (BPS, 2024). Tingginya tingkat kemiskinan ini dapat disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu 1) Masih rendahnya kualitas pembangunan manusia, 2) Kurang baiknya kualitas infrastruktur dasar dan 3) Keterbatasan lapangan pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pembangunan manusia dapat diukur melalui *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM). Berdasarkan data BPS tahun 2025, nilai IPM Kabupaten Kepulauan Meranti hanya 67,92, jauh di bawah rata-rata Provinsi Riau (74,79) maupun nasional (74,20). Hal ini menandakan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak masyarakat masih relatif rendah (BPS Provinsi Riau, 2024)

Rendahnya kualitas pendidikan tercermin dari penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dari

99,00% (2020) menjadi 85,00% (2024), serta APM SMP/MTs dari 87,87% menjadi 75,00%. Rendahnya indeks numerasi SD/MI (81,29) dan SMP/MTs (82,44) memperkuat gambaran lemahnya mutu pendidikan (Ranwal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2025-2029)

Dari aspek kesehatan, kondisi masyarakat juga tergolong rendah. Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2024 hanya mencapai 68,48 tahun, terendah di Provinsi Riau. Selain itu, tercatat angka kematian bayi sebesar 35 per 1.000 kelahiran, balita gizi buruk sebanyak 15 kasus, dan kematian neonatal 11 per 1.000 kelahiran hidup (Ranwal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2025-2029). Selain pendidikan dan kesehatan, dimensi standar hidup layak juga menjadi persoalan mendasar. Infrastruktur dasar belum memadai, dengan kondisi jalan rusak sebesar 40,93% dan rusak berat 18,89%, sementara akses air bersih baru mencapai 11,25% dan sanitasi layak 58,91%. Masih terdapat 326 rumah tangga tanpa listrik pada tahun 2024 (Ranwal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2025-2029)

Kondisi ini menunjukkan bahwa penghapusan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak dapat dilakukan secara sektoral dan parsial. Diperlukan sinergi antar tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten) untuk memperkuat efektivitas kebijakan dan memastikan integrasi program pembangunan. Sinergi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2022), yang menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi fiskal antar level pemerintahan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, termasuk penghapusan kemiskinan.

Dalam konteks tersebut, sinergi antar tingkatan pemerintahan menjadi faktor kunci dalam mempercepat pencapaian target penghapusan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sinergi dimaknai sebagai keselarasan perencanaan, pelaksanaan, dan pendanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang saling memperkuat dalam mencapai tujuan pembangunan (Kementerian PPN/Bappenas, 2024). Kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan ini penting untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas, mempercepat implementasi program prioritas, serta memastikan kebijakan daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, peningkatan efektivitas program penghapusan kemiskinan tidak hanya bergantung pada kapasitas fiskal daerah, tetapi juga pada kekuatan koordinasi dan sinergi antar pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang terpadu dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam kajian ini adalah sejauh mana sinergi antar tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten) dalam mengatasi keterbatasan fiskal daerah untuk mengimplementasikan program penghapusan kemiskinan yang selaras antara RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Riau 2025–2029, dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2025–2029?

## METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan deskriptif-komparatif, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)  
Digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor utama penyebab kemiskinan berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi pertumbuhan dampaknya. Skor diperoleh melalui diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) bersama *stakeholder* Tim Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau.
2. Analisis Perbandingan Kebijakan (*Comparative Policy Analysis*)  
Tahapan ini dilakukan untuk membandingkan arah kebijakan dan program prioritas pengentasan kemiskinan yang tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, b) Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau 2025–2029, dan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2025–2029, c) Hasil analisis selanjutnya dipetakan untuk menilai tingkat keselarasan (*alignment*) dan sinergi antartingkatan pemerintahan dalam implementasi strategi penghapusan kemiskinan.
3. Pendekatan Dokumen/Data Sekunder  
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari

dokumen resmi pemerintah, seperti publikasi BPS, laporan pembangunan daerah, serta peraturan perundangan yang relevan, yaitu : a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan d) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, dan dokumen kebijakan lainnya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menafsirkan kebijakan dalam konteks sinergi antar-pemerintahan guna mengidentifikasi peluang, kesenjangan, dan strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam upaya menentukan faktor dominan penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti, penelitian ini menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, dan Growth*) melalui proses penilaian bersama para *stakeholder* yang tergabung dalam Tim Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau. Hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.**

Skoring Penyebab Permasalahan Kabupaten Kepulauan Meranti

Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Skor
Rendahnya Kualitas Pembangunan Manusia	4	5	4	13
Kurang baiknya infrastruktur dasar	4	4	4	12
Keterbatasan lapangan pekerjaan	4	5	3	12

Sumber : Data diolah

Hasil USG menunjukkan penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah masih rendahnya kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari seberapa besar capaian indeks pembangunan manusia. Berdasarkan data BPS Provinsi Riau tahun 2025, Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat nilai IPM terendah di Provinsi Riau, yaitu sebesar 67,92. angka ini masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Riau yaitu sebesar 74,79, dan juga dibawah rata-rata nasional yang mencapai 74,20. rendahnya IPM ini mencerminkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti menghadapi tantangan yang cukup besar.

Dilihat dari unsur pembentuknya, dapat diketahui bahwa penyebab rendahnya kualitas pembangunan manusia adalah a) rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. b) rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, dan c) Rendahnya standar hidup layak (BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2020). Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain a) Rendahnya

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2024 sebesar 85,00 turun dibandingkan tahun 2020 sebesar 99,00, dan APM SMP/MTs tahun 2024 sebesar 75,00 turun dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 87,87, b) rendahnya indeks numerasi untuk SD/MI baru mencapai 81,29 dan untuk SMP/MTS baru mencapai 82,44, c) rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adalah kekurangan tenaga pendidik, akses pendidikan yang masih terbatas, dan kurangnya kualitas infrastruktur pendidikan

Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain a) capaian angka harapan hidup pada tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti paling rendah di Provinsi Riau yaitu sebesar 68,48 tahun, b) terjadinya peningkatan angka kematian bayi sebanyak 35 bayi per 1.000 kelahiran, c) jumlah balita gizi buruk sebanyak 15 orang pada tahun 2024, dan d) angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup masih ditemukan sebanyak 11 orang. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti disebabkan oleh berbagai hal antara lain a) Kurang memadainya infrastruktur kesehatan maupun infrastruktur dasar, b) belum memadainya tenaga medis, c) rendahnya kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan (Ranwal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2025-2029).

Selain permasalahan pendidikan dan kesehatan, permasalahan lainnya yang menentukan tingkat pembangunan manusia adalah rendahnya standar hidup layak. Rendahnya standar hidup layak di

Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain a) Kondisi infrastruktur dasar yang tidak memadai, b) indeks aksesibilitas rendah yaitu 0,35 poin dikarenakan kondisi jalan dalam kondisi rusak sebesar 40,93 persen dan rusak berat sebesar 18,89 persen, dan dalam kondisi sedang sebesar 26,03 persen, yang membutuhkan perbaikan jalan, c) akses terhadap air minum bersih hanya sebesar 11,25 persen, yang membutuhkan peningkatan jaringan air bersih, d) masih tingginya rumah tangga yang belum memiliki sanitasi layak yaitu sebesar 41,09 persen, yang memerlukan peningkatan jumlah rumah layak huni, d) masih terdapat rumah tangga yang belum menikmati listrik yaitu sebanyak 326 rumah tangga pada tahun 2024, yang membutuhkan peningkatan jaringan listrik (Ranwal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2025-2029)

### **Sinergi Kebijakan dalam Penghapusan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu ditempatkan dalam konteks kebijakan pembangunan nasional dan daerah secara terintegrasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *comparative policy analysis*, yakni membandingkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Riau 2025–2029, dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2025–2029. Secara umum, RPJMN 2025–2029 menargetkan penurunan tingkat kemiskinan nasional hingga di bawah 5% dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2029.

Untuk memahami relevansi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam ketiga dokumen

perencanaan tersebut, penting terlebih dahulu meninjau landasan teoritis yang menjelaskan hakikat dan penyebab kemiskinan. Pemahaman terhadap teori-teori kemiskinan menjadi dasar dalam menilai sejauh mana kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah telah mencerminkan pendekatan yang tepat dalam mengatasi persoalan kemiskinan secara komprehensif.

Berdasarkan berbagai teori kemiskinan, dapat dipahami bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang bersifat kompleks, multidimensi, dan memerlukan intervensi kebijakan yang terintegrasi. Teori Lingkaran Kemiskinan menjelaskan bahwa kemiskinan dapat bersifat turun-temurun akibat keterbatasan modal, pendidikan, dan kesehatan yang saling memperkuat dalam suatu siklus yang sulit diputus (Nurkse, 1953). Sementara itu, Teori Keynesian menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengoreksi ketidakseimbangan ekonomi melalui kebijakan fiskal, subsidi, dan program perlindungan sosial (Keynes, 1936).

Adapun Pendekatan Multidimensional melihat kemiskinan tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap layanan dasar, kesempatan kerja, dan partisipasi sosial ((United Nations Development Programme [UNDP], 2010)). Sejalan dengan pandangan tersebut, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 menegaskan bahwa percepatan penghapusan kemiskinan dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, b) Peningkatan pendapatan masyarakat, dan c) Penurunan jumlah kantong-

kantong kemiskinan (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan [Kemenko PMK], 2022). Ketiga strategi ini menuntut sinergi lintas sektor serta peran aktif pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, untuk melihat sejauh mana arah kebijakan pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan telah mendukung pelaksanaan ketiga strategi tersebut, dilakukan analisis terhadap dukungan konseptual dan kebijakan nasional, dokumen perencanaan jangka menengah, meliputi RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti, RPJMD Provinsi Riau, dan RPJMN 2025–2029. Analisis ini mengklasifikasikan program-program yang tertuang dalam masing-masing dokumen ke dalam tiga strategi penghapusan kemiskinan tersebut.

#### **Dukungan Konseptual dan Kebijakan Nasional**

Upaya penghapusan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum dan kebijakan nasional yang menjadi landasan pelaksanaan pembangunan di seluruh tingkat pemerintahan. Sejumlah regulasi dan kebijakan strategis memberikan dukungan normatif, konseptual, maupun operasional terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di daerah. Berikut adalah regulasi yang menjadi landasan dalam penghapusan kemiskinan :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan pentingnya keterpaduan antara perencanaan pembangunan

jangka panjang, menengah, dan tahunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Undang-undang ini menjadi dasar bagi sinkronisasi arah kebijakan penghapusan kemiskinan antara RPJMN, RPJMD Provinsi Riau, dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga setiap program pembangunan memiliki kesinambungan dan konsistensi sasaran.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, termasuk urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tanggung jawab langsung dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dan penghapusan kemiskinan melalui penyediaan layanan dasar yang memadai.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) memperkuat peran desentralisasi fiskal dengan memberikan ruang bagi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan serta mengarahkan belanja daerah secara efektif dalam mendukung prioritas nasional, termasuk penanggulangan kemiskinan. Melalui mekanisme *Dana Alokasi Umum (DAU) tematik* dan *Dana Alokasi Khusus (DAK)* berbasis

- kinerja, pemerintah daerah memiliki insentif untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan fiskal antara pusat dan daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional. Regulasi ini mendukung penguatan perencanaan dan penganggaran terpadu (*integrated planning and budgeting system*) yang diperlukan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah tertinggal.
- e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menjadi rujukan utama dalam penentuan arah kebijakan dan strategi nasional. RPJMN menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2029 melalui pendekatan multidimensi yang mencakup peningkatan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran, dan pemutusan rantai kemiskinan antar-generasi. Arah kebijakan ini sejalan dengan prioritas RPJMD Provinsi Riau dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendanaan oleh Pemerintah Daerah memberikan dasar hukum bagi penyelarasan dan kolaborasi sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah dapat mengakses dukungan pendanaan sinergis, baik dari APBN, APBD, maupun sumber pembiayaan lain, untuk memperkuat intervensi program penghapusan kemiskinan secara lintas sektor.
- g. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan menjadi panduan teknis yang komprehensif dalam pelaksanaan strategi nasional penghapusan kemiskinan ekstrem. Dokumen ini mengatur mekanisme koordinasi lintas kementerian/lembaga, pelibatan pemerintah daerah, serta tata kelola pendanaan dan pemantauan program secara terintegrasi.
- Dengan adanya dukungan berbagai regulasi tersebut, kebijakan penghapusan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki landasan hukum, arah kebijakan, dan dukungan fiskal yang kuat. Tantangan utama ke depan adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah melalui harmonisasi perencanaan, kolaborasi pendanaan, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan data kemiskinan terpadu.



## **Analisis Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2025-2029**

### **Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat**

Mencermati dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025-2029, ditemukan 5 (lima) program prioritas yang mendukung strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat pada berbagai sektor, yaitu sektor kesehatan dan perdagangan (pertumbuhan ekonomi).

Diketahui bahwa program-program prioritas yang direncanakan selama lima tahun ke depan (2026–2030) lebih banyak fokus di sektor kesehatan. empat dari lima program yang dirancang berasal dari sektor ini, dengan tujuan utama mewujudkan “kesehatan untuk semua” dengan indikator indeks kesehatan. Program dengan alokasi terbesar dan paling dominan adalah program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, yang memiliki total anggaran lebih dari 561 miliar rupiah. Program ini punya porsi terbesar tiap tahunnya, bahkan mencapai 153 miliar rupiah di awal tahun perencanaan. Selain itu, ada juga program lain seperti Program Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan-Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dan Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan. masing-masing program ini punya anggaran yang cukup bervariasi, dari yang hanya sekitar 298 juta rupiah sampai yang di atas 2 miliar Rupiah secara keseluruhan.

Sementara itu, sektor perdagangan (pertumbuhan ekonomi) hanya memiliki satu program prioritas, yaitu Program Stabilisasi Harga Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Program ini diarahkan untuk menjaga kestabilan ekonomi, khususnya mengendalikan tingkat inflasi. Meskipun hanya satu, program ini tetap penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Anggaran program ini cenderung meningkat setiap tahun, dimulai dari 209 juta rupiah di tahun 2026 hingga sekitar 307 juta rupiah di tahun 2030, dengan total anggaran lebih dari 1,2 miliar Rupiah.

Jika dijumlahkan, total anggaran dari semua program prioritas yang ada mencapai hampir 569 miliar Rupiah selama lima tahun. hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar memprioritaskan sektor kesehatan, baik dari jumlah program maupun besar anggarannya, dibandingkan sektor lainnya.

### **Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat**

Setelah mencermati dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2029, terdapat beberapa program prioritas yang dinilai dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur.

Pada sektor pendidikan, fokus utama adalah meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan yang diukur melalui indeks pendidikan. Program-program seperti Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan mendapat alokasi dana yang cukup signifikan dengan total pagu masing-masing sekitar 1,29 miliar rupiah dan 1,5 miliar Rupiah selama lima tahun.

Sektor peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki sasaran meningkatkan produktivitas ekonomi daerah serta stabilitas ekonomi, dengan indikator seperti PDRB per kapita, nilai investasi, dan tingkat inflasi. Berbagai program pendukung dijalankan seperti Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Pengawasan Koperasi, hingga Program Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal. Anggaran terbesar dalam sektor ini dialokasikan untuk Program Pemasaran Pariwisata yang mencapai total pagu sebesar 18,8 miliar Rupiah, serta Program Promosi Penanaman Modal dengan total pagu mencapai 11,6 miliar Rupiah selama periodisasi lima tahun.

Pada sektor infrastruktur, sasaran utama adalah meningkatkan aksesibilitas transportasi dan meratakan pelayanan infrastruktur daerah. Indikator yang dipakai adalah indeks infrastruktur daerah dan indeks ketimpangan infrastruktur wilayah. Program prioritas termasuk Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Program Penataan Bangunan Gedung. Dari segi anggaran, Program Penataan Bangunan Gedung mendapatkan alokasi terbesar, yaitu hampir 96,7 miliar Rupiah dalam lima tahun,

Secara keseluruhan, sudah terlihat upaya terencana dalam berbagai sektor untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta memperbaiki infrastruktur daerah. Total pagu anggaran pada periodisasi

lima tahun ini mencapai angka yang cukup besar yaitu 165,7 miliar Rupiah

### **Strategi Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan**

Setelah mengkaji dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025–2029, terdapat beberapa program yang diperkirakan bisa membantu mengurangi kantong-kantong kemiskinan, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, pengurangan ketimpangan kesejahteraan, dan peningkatan perlindungan sosial yang adaptif.

Secara umum, total anggaran pembangunan pada sektor-sektor diatas untuk periode lima tahun mencapai 2,031 triliun Rupiah. Anggaran ini tersebar ke berbagai sektor utama, seperti kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan perlindungan sosial.

Sektor infrastruktur menjadi sektor dengan alokasi anggaran terbesar, yaitu mencapai ratusan miliar setiap tahunnya, dengan total kumulatif sangat signifikan. Program-program dalam sektor ini antara lain Program Pembangunan Jalan, Perumahan, Sistem Air Bersih, Air Limbah, dan Drainase. Salah satu contohnya, Program Penyelenggaraan Jalan mendapat total anggaran sebesar 915,9 miliar Rupiah selama periodisasi lima tahun, menunjukkan bahwa pembangunan fisik dan konektivitas wilayah masih menjadi prioritas utama. Pada sektor pendidikan, terdapat Program Pengelolaan Pendidikan yang menempati posisi kedua dalam jumlah anggaran

terbesar, dengan total 463,1 miliar Rupiah selama periodisasi lima tahun. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah memberikan perhatian besar terhadap pendidikan berkualitas dan merata. Pada sektor ini juga terdapat dukungan untuk tenaga pendidik dan pengembangan perpustakaan.

Untuk sektor kesehatan, anggaran terbesar diarahkan ke Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar 100,3 miliar Rupiah, yang fokus pada pemenuhan tenaga dan kualitas layanan kesehatan. Selain itu, terdapat juga program terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang turut mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar.

Pada sektor pertumbuhan ekonomi, meskipun anggaran tidak sebesar sektor lain, program seperti Pemberdayaan UMKM, pelatihan koperasi, dan perlindungan koperasi tetap disiapkan dengan total anggaran puluhan miliar. Ini menunjukkan dorongan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan dari bawah.

Sektor pengentasan kemiskinan juga menjadi perhatian penting. Beberapa program seperti Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial masing-masing dialokasikan sekitar 9,4 miliar Rupiah dan 36 miliar Rupiah. Hal ini merupakan upaya nyata untuk menurunkan angka kemiskinan dan memberikan jaminan hidup layak bagi kelompok rentan.

Selain itu, sektor penurunan ketimpangan kesejahteraan dan perlindungan sosial adaptif mencakup program-program seperti pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, distribusi perdagangan, serta

perlindungan terhadap migran korban kekerasan. Walaupun anggarannya lebih kecil dibanding sektor lainnya, program ini secara langsung kepada peningkatan kualitas hidup dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, penyusunan anggaran ini mencerminkan arah pembangunan daerah yang menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kenaikan anggaran setiap tahunnya juga menunjukkan adanya komitmen berkelanjutan untuk menyelesaikan isu-isu strategis daerah dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah.

Untuk memastikan ketiga strategi dan program pengentasan kemiskinan yang sudah dikemukakan sebelumnya dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan alokasi anggaran yang memadai. Memperhatikan proyeksi pendapatan kabupaten Kepulauan Meranti periode 2025-2029, dan kebutuhan belanja wajib mengikat (belanja pegawai), dapat diketahui bahwa alokasi anggaran untuk belanja pembangunan sangat terbatas.

Proyeksi pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti cenderung naik dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 1,1 triliun terus meningkat hingga tahun 2026 menjadi 1,6 triliun. Memperhatikan rata-rata realisasi belanja pegawai dari tahun 2020-2024 jika dibandingkan dengan rata-rata proyeksi pendapatan, diketahui proporsi belanja pegawai terhadap total pendapatan adalah sebesar 27,75 persen, hal ini masih dalam kategori baik.

Memperhatikan rata-rata kebutuhan program penghapusan

kemiskinan 2025-2029 terhadap rata-rata proyeksi pendapatan 2025-2029, diketahui besaran alokasinya sebesar 32,23 persen. Alokasi anggaran sebesar 32,23 persen untuk penghapusan kemiskinan ini merupakan alokasi anggaran yang cukup besar, dan masih terbatas pada 1 (satu) permasalahan pembangunan yaitu penghapusan kemiskinan, sedangkan masih banyak permasalahan pembangunan lainnya yang juga membutuhkan alokasi anggaran dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dari berbagai program-program prioritas yang telah disampaikan tersebut, pada dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2025-2029 tidak ditemukan pemetaan antara program-program daerah dengan program-program Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat dalam penghapusan kemiskinan, hal ini menunjukkan kurangnya sinergi program antar tingkatan pemerintahan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dipandang perlu untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat, dan Dunia Usaha dalam melaksanakan program-program penghapusan kemiskinan.

#### **Analisis Dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau 2025-2029**

##### **Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat**

Memperhatikan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau 2025-2029, dapat diketahui program utama dan rencana aksi yang akan dijalankan di beberapa bidang di provinsi Riau yang menunjukkan sektor yang menjadi fokus, nama program prioritas, serta

langkah-langkah yang direncanakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau.

Terdapat berbagai program prioritas yang fokus pada beberapa sektor penting di Provinsi Riau, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta menurunnya ketimpangan kesejahteraan. Pada sektor kesehatan, program prioritas “Riau Sehat” berusaha memperkuat layanan kesehatan melalui berbagai upaya, mulai dari memperluas jaminan kesehatan nasional, memperbaiki fasilitas seperti posyandu dan rumah sakit, hingga menambah jumlah dan kualitas tenaga medis serta dokter spesialis. Selain itu, ada juga usaha pencegahan penyakit menular dan peningkatan gaya hidup sehat lewat pola makan bergizi dan olahraga. Program prioritas di sektor pendidikan adalah “Riau Cerdas” yang menyediakan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan penyandang disabilitas, serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Di sektor infrastruktur, program “Riau Mantap” fokus pada ketahanan energi, pengelolaan limbah, pembangunan jalan, serta fasilitas publik seperti Islamic Centre dan kawasan perkantoran. Terakhir, untuk menurunkan ketimpangan kesejahteraan, ada program prioritas “Riau Membangun Desa Majukan Kota” yang berfokus pada transportasi publik perkotaan dan pemberian bantuan keuangan untuk desa. Secara keseluruhan, program-program prioritas ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Riau secara merata dan berkelanjutan.

### **Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat**

Terdapat berbagai program prioritas pembangunan di Provinsi Riau yang terbagi ke dalam beberapa sektor utama, seperti pendidikan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. Setiap sektor memiliki program unggulan masing-masing, misalnya sektor pendidikan dengan program "Riau Cerdas" yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui dukungan terhadap pertukaran mahasiswa dan penguatan kerja sama pendidikan. Sektor infrastruktur mengukung program "Riau Mantap" yang fokus pada pengembangan sarana strategis, seperti relokasi bandara Sultan Syarif Qasim II di Pekanbaru dan penyiapan jalur kereta barang untuk mendukung kawasan industri. Sementara itu, sektor pertumbuhan ekonomi menjalankan program "Riau Berdaya Saing" dengan mendorong hilirisasi produk unggulan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah. Secara keseluruhan, rencana aksi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun Riau secara terarah dan berkelanjutan, melalui kolaborasi lintas sektor yang saling mendukung.

### **Strategi Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan**

Untuk memahami arah pembangunan daerah yang berpihak pada kebutuhan masyarakat, penting bagi kita melihat bagaimana program-program prioritas di berbagai sektor dirancang. Terdapat sektor-sektor utama seperti kesehatan dan pendidikan, lengkap dengan program prioritas serta rencana aksi yang telah dirancang untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Riau yang lebih sehat dan cerdas

Pada sektor kesehatan, program "Riau Sehat" ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai langkah konkret, seperti pemberian santunan kepada ibu hamil, edukasi untuk remaja putri, serta upaya pencegahan *stunting* dan peningkatan gizi anak. Sementara itu, sektor pendidikan mengukung program "Riau Cerdas" yang mencakup berbagai inisiatif seperti pendidikan gratis untuk SMA/SMK dan Madrasah, kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendukung akses pendidikan yang lebih luas, serta penguatan pendidikan moral dan keagamaan. Narasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak hanya fokus pada aspek fisik pembangunan, tapi juga sangat memperhatikan kualitas hidup dan kapasitas intelektual masyarakatnya. Dengan adanya rencana aksi yang jelas, kedua sektor ini diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam mewujudkan generasi Riau yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

### **Analisis Dokumen RPJMN 2025-2029**

#### **Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat**

Melalui RPJMN 2025-2029, Pemerintah telah membuat *highlight* intervensi kebijakan untuk setiap Provinsi, demikian juga di Provinsi Riau. Salah satu lokus intervensi kebijakan dimaksud adalah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Data ini menampilkan gambaran awal terkait lokasi prioritas dan jenis dukungan program dari Kementerian/Lembaga, yang menjadi dasar identifikasi pola intervensi awal dari sisi sosial dan ekonomi.

Kebijakan spasial yang dilakukan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti

untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat memiliki Fokus utama pada intervensi sosial, khususnya melalui program bantuan sosial adaptif yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin. Intervensi ini melibatkan Kementerian Sosial sebagai pelaksana, dengan sasaran langsung ke daerah-daerah yang dianggap memiliki kerentanan tinggi terhadap kemiskinan. Dari segi *mapping*, pendekatan yang digunakan adalah pengurangan beban, dan hasil yang diharapkan adalah turunnya angka kemiskinan. Jadi, hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyasar kebutuhan dasar masyarakat melalui pendekatan sosial berbasis wilayah.

### **Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat**

Untuk memperkuat analisis terhadap pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi di kawasan afirmasi, arah kebijakan pembangunan RPJMN memiliki program strategis yang diarahkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan penguatan konektivitas. Penyajian ini mencakup peran masing-masing Kementerian/Lembaga serta pendekatan sektoral yang digunakan, dengan harapan mampu menjawab tantangan pembangunan wilayah terluar.

*Highlight* indikasi intervensi mencakup pembangunan bandara perintis, pelabuhan, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga percepatan transformasi digital. Yang menarik di sini adalah keterlibatan lintas kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Komdigi, dan Kemenko Perekonomian dalam mengawal program-program ini. Dilihat dari arah kebijakan yang diambil, program-program ini

berfokus pada upaya meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bagaimana pembangunan fisik dan ekonomi menjadi prioritas untuk mendorong kawasan tersebut lebih maju dan berdaya saing.

### **Strategi penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan**

Guna memperluas perspektif terhadap kebijakan spasial dan penurunan kemiskinan secara menyeluruh, pada RPJMN 2025-2029 terdapat highlight indikasi intervensi untuk pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan SPAM, hingga ketahanan bencana di wilayah prioritas. Diketahui terdapat upaya sinergi antar sektor dan lembaga dalam upaya mempercepat transformasi wilayah tertinggal, khususnya melalui pendekatan multi-sektor dan berorientasi hasil.

Selain menyentuh pembangunan infrastruktur, juga terdapat program-program yang bersifat multi-sektor, seperti penyediaan air bersih, ketahanan bencana, serta penurunan kantong-kantong kemiskinan. Di sini kita bisa melihat bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya satu sektor saja, melainkan merupakan kerja sama antar kementerian, seperti Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, hingga KEMENKO PMK. Program-program ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara keseluruhan, hal ini menggambarkan upaya pemerintah untuk menciptakan pembangunan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di daerah tertinggal.

### **Alternatif Pilihan Kebijakan**

Sebagaimana hasil analisis terhadap dokumen perencanaan jangka menengah pada masing-masing tingkatan pemerintahan diatas, menjadi penting untuk memetakan program-program prioritas terhadap sumber pendanaannya pada dokumen perencanaan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memetakan lebih lanjut alternatif kebijakan pendanaan program prioritas penghapusan kemiskinan melalui :

- a) APBD Kabupaten Kepulauan Meranti (PAD, TKD, Pembiayaan Utang Daerah)
- b) Meminta dukungan kepada Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk : 1) bantuan keuangan, 2) belanja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Riau yang lokusnya berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan 3) belanja Tugas Pembantuan (TP) Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c) Meminta dukungan Pemerintah Pusat melalui : 1) Dana Alokasi Khusus, 2) belanja Kementerian/lembaga, dan 3) belanja Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- d) Pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

### **KESIMPULAN**

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas pembangunan manusia (IPM 67,92), yang dipengaruhi oleh

rendahnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan standar hidup layak masyarakat. Permasalahan tersebut diperkuat oleh keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya akses air bersih dan sanitasi, serta belum meratanya layanan pendidikan dan kesehatan.

Belum terlihat sinergi/keterpaduan pelaksanaan program penghapusan kemiskinan pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2025-2029 dengan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat dan terdapat keterbatasan fiskal untuk mendanai program-program prioritas, terutama program prioritas penghapusan kemiskinan, sehingga membutuhkan kolaborasi dan sinergi pendanaan.

Secara keseluruhan, keberhasilan penghapusan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta optimalisasi dukungan kebijakan dan pendanaan yang terintegrasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah Untuk Sinergi Pendanaan Oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka penghapusan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan fiskal, direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan kolaborasi dengan bersinergi kepada Pemerintah

Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat dengan melakukan sinergi pendanaan yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Sinergi Pendanaan berdasarkan dokumen perencanaan

Sinergi pendanaan dimaksud dilakukan dengan membuat usulan dukungan sinergi pendanaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri PPN/Bappenas RI dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, serta Menteri terkait dengan periode penyampaian usulan pada tanggal 1 November sampai dengan tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan.

Usulan dukungan sinergi pendanaan disampaikan melalui surat Kepala Daerah dengan melampirkan beberapa dokumen seperti :

- 1) Rencana sinergi pendanaan,
- 2) Ringkasan eksekutif mengenai bentuk, biaya, jadwal, rencana konstruksi, dan sumber pendanaan kegiatan dalam sinergi pendanaan, termasuk kegiatan yang diharapkan sebagai dukungan Pemerintah
- 3) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berikutnya, dalam hal Pemerintah Daerah belum menyampaikan melalui sistem informasi keuangan daerah, dan
- 4) Surat pernyataan mengetahui usulan dukungan sinergi pendanaan dari masing-masing Kepala Daerah terkait, dalam hal dukungan sinergi pendanaan yang diusulkan meliputi kegiatan pada beberapa daerah (terdapat daerah lain selain daerah pengusul)

Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran usulan dukungan

sinergi pendanaan, dan berkoordinasi bersama unit terkait, Menteri PPN/BAPPENAS RI, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri terkait dalam rangka melakukan penilaian atas usulan dukungan sinergi pendanaan yang sudah lengkap dan benar.

Penilaian terhadap usulan dukungan sinergi pendanaan dilakukan dalam forum pembahasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan mempertimbangkan :

- 1) Kesesuaian kegiatan terhadap pencapaian target prioritas nasional
- 2) Kapasitas fiskal daerah
- 3) Karakteristik wilayah
- 4) Jumlah pihak yang terlibat dalam sinergi pendanaan
- 5) Besaran porsi APBD dalam pendanaan sinergi pendanaan, dan
- 6) Kelayakan teknis terkait kegiatan yang diusulkan menjadi dukungan Pemerintah

Persetujuan dukungan sinergi pendanaan dapat diberikan berupa rekomendasi :

- 1) Pengalokasian TKD, dan/atau
- 2) Belanja Kementerian/Lembaga.

Dalam hal usulan dukungan sinergi pendanaan disetujui oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah memasukkan dukungan ke dalam RKPD untuk dibahas dalam forum perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase penduduk miskin (P0) menurut kabupaten/kota (persen)*, 2024. <https://www.bps.go.id/id/stati>



- stics-table/2/NjIxlZl=/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-kabupaten-kota.html
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti. (2025). *Kemiskinan* 2024. <https://merantikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzYjMg==/kemiskinan.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2024). *[Metode baru] Indeks pembangunan manusia, 2024*. <https://riau.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAjMg==/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-riau--2023.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2025). *Provinsi Riau dalam angka 2025*. BPS Provinsi Riau.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendanaan oleh Pemerintah Daerah*.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2022). *Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Pedoman umum sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah*.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Palgrave Macmillan.
- Nurkse, R. (1953). *Problems of capital formation in underdeveloped countries*. Basil Blackwell.
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. (2025). *Rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025-2029*.
- Pemerintah Provinsi Riau. (2025). *Rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025-2029*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*.
- United Nations Development Programme. (2010). *Human development report 2010: The real wealth of nations: Pathways to human development*. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2010>